

LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT PERTANGGUNGJAWABAN PEBISNIS DI KOTA SURAKARTA

Eko Meiningsih Susilowati
susilowatieko7@gmail.com
STIE-AUB Surakarta

ABSTRAK

This study aims are to determine how financial statements used as a tool of accountability of businessmen. This study uses primary data. The population in this study are the businessmen in Surakarta. While the sample are the businessmen who engaged in services and trade in Surakarta. Samples were selected using proportional random sampling. The analysis uses percentages. The results showed that the majority of businesses in Surakarta are familiar with the financial statements and has been implementing the financial statements as a liability. Although they present the financial statements in the form of incomplete financial statements. Financial reports they use to facilitate calculating the level of profitability (profit company) and the company's level of risk. Most of the financial statements also provide information related to decision making for businesses in Surakarta.

Keywords: laporan keuangan, pertanggungjawaban

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini globalisasi sudah menjangkau ke banyak aspek kehidupan. Akibat yang ditimbulkan persaingan menjadi semakin tajam. Begitu juga dalam dunia bisnis sebagai salah satu bagian yang juga mengalami persaingan. Contohnya perusahaan, perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan lain di seluruh dunia. Perusahaan yang bisa menyediakan barang atau jasa yang memenuhi selera atau keinginan konsumen yang dapat bersaing dalam pasar global. Keberhasilan usaha suatu perusahaan juga dapat dilihat dari laporan keuangannya. Dalam laporan tersebut dapat diketahui keadaan atau kondisi suatu perusahaan. Dengan laporan keuangan perusahaan dapat mengetahui perusahaannya memperoleh laba atau rugi, sehat atau tidak dan berkembang atau tidak.

Seorang pebisnis juga harus mempunyai tanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan, karena usaha mereka memerlukan pengendalian dalam penyusunan laporan keuangan. Pengendalian tersebut mulai dari pengendalian *inflow* (uang masuk) sampai dengan pengendalian *outflow* (uang keluar). Pengendalian terhadap laporan keuangan merupakan usaha untuk meminimalisasi adanya penyimpangan dalam pembuatan laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip yang berlaku umum, serta dapat dipertanggungjawabkan bisa membantu para pemakai informasi dalam pengambilan keputusan. Apabila pengendalian dalam penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan baik, maka apabila terjadi penyimpangan dapat segera ditangani sehingga laporan keuangan yang dihasilkan bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Dalam kenyataannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan tersebut salah satunya adalah dimana informasi yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan umum pemakai, tetapi banyak yang tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini yaitu apakah laporan keuangan sudah diterapkan sebagai alat pertanggungjawaban pebisnis di Kota Surakarta? Dan penelitian ini mempunyai tujuan: untuk menganalisa penerapan laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban pebisnis di kota Surakarta. Dan penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Untuk perbaikan yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- b. Untuk memberikan gambaran terutama dalam bidang akuntansi mengenai penerapan laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban.

B. LANDASAN TEORI

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan. Laporan keuangan dibuat untuk tujuan mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepada manajemen dari pemilik perusahaan. Selain itu laporan keuangan juga dapat digunakan untuk memenuhi tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak di luar perusahaan. Agar laporan keuangan bisa digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang diterima umum. Di Indonesia prinsip akuntansi disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara periodik. Periode yang digunakan biasanya adalah tahunan, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Walaupun laporan keuangan biasanya dibuat secara tahunan, tetapi laporan keuangan dapat juga dibuat lebih singkat misalnya kuartal, triwulan, dan bahkan bulanan. Tujuan pelaporan keuangan secara sederhana adalah untuk mendapatkan modal murah. Semakin rendah tingkat bunga untuk perusahaan apabila meminjam atau semakin tinggi harga jual apabila mereka menjual saham kepada investor baru (Shayne *et al.*, 2012).

Tujuan laporan keuangan menurut (Baridwan, 1997: 4), tujuan umum laporan keuangan yaitu: a) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya yang ada hubungannya dengan sumber ekonomi, modal, dan kewajiban. b) Memberikan informasi yang dapat dipercaya yang berhubungan dengan perubahan pada sumber ekonomi neto yang timbul dari aktivitas usaha untuk memperoleh laba. c) Membantu memberikan informasi keuangan kepada para pemakai dalam meramalkan potensi perusahaan untuk menghasilkan laba. d) Memberikan informasi tentang perubahan dalam sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban. e) Mengungkapkan informasi lain yang ada hubungannya dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan para pemakai. f) Sedangkan tujuan kualitatif laporan keuangan yaitu laporan keuangan harus relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap.

Analisa terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya digunakan untuk mengetahui profitabilitas dan resiko. Analisa laporan keuangan mencakup analisa rasio keuangan, analisa kelemahan dan kekuatan. Dalam bidang finansial analisa laporan keuangan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen di masa lalu dan keadaan di masa yang akan datang. Demikian pula di bidang usaha jasa dan perdagangan. Perusahaan jasa dan perdagangan membutuhkan laporan keuangan salah satunya adalah untuk mengetahui keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita, dan seberapa banyak keuntungan atau kerugian tersebut.

Laporan keuangan dapat diandalkan dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan yang sebenarnya mengenai suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Keadaan ini dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Apalagi informasi mengenai kinerja keuangan begitu bermanfaat untuk beberapa pihak seperti manajemen, investor, kreditur, pemerintah, *bankers*, dan pihak lain yang berkepentingan.

Penyusunan laporan keuangan yang menerima opini-opini audit wajar tanpa pengecualian, kontrol internal yang diperlukan dan sistem informasi, akan membantu menghasilkan informasi yang berguna dan tepat waktu untuk manajemen dalam pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan untuk mengurangi risiko kerusakan integritas keuangan. Laporan keuangan yang diaudit juga menunjukkan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas sumber daya. Ada beberapa argumen mengenai laporan keuangan, yaitu: a) Jika laporan keuangan menerima pendapat auditor wajar tanpa pengecualian secara rutin, pemerintah akan memperoleh informasi yang berguna yang lebih handal dan tepat

waktu untuk pengambilan keputusan internal manajemen. Masalah ini mengabaikan perbedaan yang melekat antara akuntansi keuangan yang berorientasi secara eksternal dan akuntansi manajerial yang berorientasi secara internal. Setelah ada kontrol dan sistem yang ada memungkinkan laporan keuangan yang diaudit digunakan oleh pihak luar, masih banyak tantangan yang diperlukan untuk menghasilkan informasi biaya yang berguna untuk manajer internal. b) Proses penyusunan laporan keuangan diaudit di sektor swasta memiliki efek yang sama pada risiko keuangan di sektor publik. Di sektor swasta, proses penyusunan dan laporan keuangan audit mungkin memang mengungkap masalah kontrol internal yang dapat menyebabkan kesalahan materi atau kekeliruan, dan manajer sektor swasta dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengurangi risiko bahwa laporan keuangan mereka menjadi tidak dapat diandalkan, jika itu terjadi, akan memicu penurunan yang cukup besar pada harga saham perusahaan mereka. Tetapi kinerja keuangan yaitu membangun ekuitas dan menghasilkan uang bukan merupakan kegiatan pemerintah, sehingga penyusunan laporan keuangan dalam pemerintah tidak menyediakan jenis perlindungan yang sama terhadap kerusakan integritas keuangan seperti halnya di sektor swasta. c) Penyusunan laporan keuangan memberikan tingkat yang sama dan tingkat kepastian pengelolaan dan pertanggungjawaban atas sumber daya sebagai penyusunan laporan keuangan di sektor swasta. Di sektor swasta, laporan keuangan yang diaudit memberikan beberapa tingkatan jaminan pengelolaan dan pertanggungjawaban. Hal ini menarik karena berlaku juga untuk sektor publik. Masalah timbul karena sifat pengelolaan, pertanggungjawaban, dan keinginan masyarakat secara fundamental berbeda. Pemangku kepentingan sektor swasta ingin manajer memberikan perhatian yang cukup terhadap faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk tetap eksis dan menghasilkan keuntungan. *Stakeholder* sektor publik sebaliknya, pemerintah akan selalu didukung oleh pajak dan tidak mungkin keluar dari eksistensi, sehingga jaminan yang mereka inginkan adalah apakah manajer pemerintah melindungi aset dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik yang baik.

2. Pertanggungjawaban

Tinjauan literatur menunjukkan banyak cara yang berbeda untuk melihat pertanggungjawaban dan banyak kerangka kerja yang berbeda yang digunakan untuk mengatur dan menjelaskan konsep pertanggungjawaban. Konsep pertanggungjawaban dapat dicapai melalui misalnya dengan laporan evaluasi, laporan keuangan, dan hukum. Tujuan pertanggungjawaban yang ingin dicapai yaitu untuk transparansi dan legitimasi. Koppell (2005) menjelaskan pertanggungjawaban ada lima konstruksi yaitu transparansi, tanggung jawab, pengendalian, tanggung jawab, dan responsif. Menurut (Christensen dan Ebrahim 2006; Ebrahim 2003a, b, 2005; Ebrahim dan Weisband 2007), menjelaskan bahwa secara fundamental makna pertanggungjawaban sepenuhnya bergantung pada pemangku kepentingan dan jenis mekanisme tertentu dimana mereka berharap untuk melihat pertanggungjawaban itu sendiri. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan harus menjadi titik awal dalam upaya untuk merancang kerangka pemahaman tentang pertanggungjawaban.

Penelitian yang dilakukan Saraswati *et al* (2013) hasilnya adalah berdasarkan perhitungan rasio menurut pedoman pemeringkatan koperasi yang bisa dilihat dari tingkat aktivitas koperasi dari tahun 2009 hingga tahun 2011 diperoleh kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2012 diperoleh kategori tidak efektif yang berarti laporan keuangan dapat menunjukkan pentingnya suatu analisis sebagai salah satu alat untuk menilai keberhasilan manajemen.

C. METODE PENELITIAN.

1. Populasi dan Sampel Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Obyek penelitian ini adalah para pebisnis di Kota Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pebisnis yang ada di Kota Surakarta pada tahun 2012, sedangkan untuk sampel yang digunakan adalah para pebisnis yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan di Kota Surakarta. Perusahaan di bidang jasa meliputi jasa transportasi, percetakan, pengiriman barang, sedangkan untuk perdagangan meliputi kebutuhan industri, elektronik, kebutuhan rumah tangga, komputer, kesehatan, mebel, pakaian, dan kerajinan. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *proportional random sampling*.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Angket

Angket yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui responden. Pengisian jawaban responden dengan cara memberikan tanda silang pada jawaban yang telah disediakan.

Variabel laten (konstruk) yang ada diwujudkan dalam variabel manifes (indikator) dan dijabarkan lagi menjadi item-item pernyataan. Jawaban pertanyaan responden ini diukur dengan suatu skala sehingga hasilnya berbentuk angka (skor). Selanjutnya skor ini diolah dengan metode statistik. Dari berbagai macam analisis, digunakan analisis yang sesuai dengan kebutuhan. Analisis yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu presentase (%) pernyataan. Dari angket yang telah diberikan ke responden dinilai dengan kriteria yaitu:

- 1) Sangat setuju, bila persentase 75%-100%
- 2) Setuju, bila persentase 50%-74%
- 3) Tidak setuju, bila persentase 25%-49%
- 4) Sangat tidak setuju, bila persentase kurang dari 24%

b. Survey

Survey dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang dijadikan obyek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Tipe pertanyaan dalam angket berbentuk tertutup. Berikut ini merupakan pengelompokan daftar pertanyaan atau kuesioner:

- 1) Pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah pertanyaan mengenai pengetahuan responden tentang laporan keuangan.
- 2) Pertanyaan nomor 5 sampai dengan nomor 6 adalah pertanyaan mengenai sikap responden tentang manfaat laporan keuangan.
- 3) Pertanyaan nomor 7 sampai dengan nomor 11 adalah pertanyaan mengenai responden tentang penerapan laporan keuangan.

Tabel 1
Indikator Variabel dan Skala Pengukuran

Variabel	indikator	Sub-indikator	Skala pengukuran	instrumen
Variabel Independen-Laporan Keuangan	Penggunaan laporan keuangan	1. Pemahaman mengenai laporan	Ordinal	Kuesener

		keuangan 2. Tingkat profitabilitas dan tingkat risiko 3. Sebagai alat pertanggungjawaban 4. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan untuk pengambilan keputusan 5. Laporan keuangan yang sistematis dan terperinci		
Variabel Dependen- Pertanggungjawaban	Penerapan sebagai alat pertanggungjawaban	1. Penerapan laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban 2. Penyajian laporan keuangan dalam bentuk laporan yang lengkap 3. Penyusunan laporan keuangan sesuai prosedur 4. Penyusunan laporan keuangan secara periodik 5. Memudahkan mengetahui tingkat profitabilitas dan risiko 6. Seberapa besar penerapan laporan keuangan	Ordinal	Kuesener

Sumber: Viyanti dan Se Tin (2010)

3. Metode Analisa Data.

Analisa data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Analisa deskriptif, yaitu bagaimana laporan keuangan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban oleh para pebisnis di Kota Surakarta.
2. Analisa statistik, yaitu pengujian hipotesis yang dilakukan dengan perhitungan prosentase yang menunjukkan seberapa besar peranan laporan keuangan sebagai alat untuk pertanggungjawaban. Alternatif jawaban dalam kuesioner, yaitu sangat setuju, setuju,

tidak setuju, dan sangat tidak setuju, masing-masing dinilai dengan skor 4, 3, 2, dan 1. Perhitungan prosentase jawaban digunakan persamaan dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah jawaban} \times 100\%}{\text{Jumlah jawaban kuesioner}}$$

Jumlah jawaban kuesioner

Hasil perhitungan diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Prosentase 75%-100%, yaitu sebagian besar laporan keuangan sudah diterapkan secara lengkap oleh para pebisnis di Kota Surakarta.
- 2) Prosentase 50%-74%, yaitu laporan keuangan cukup banyak diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta.
- 3) Prosentase 25%-49%, yaitu laporan keuangan kurang diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta.
- 4) Prosentase kurang dari 25%, yaitu laporan keuangan tidak diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta.

Apabila hasil kuesioner berada diantara range 75%-100%, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban sudah diterapkan secara lengkap oleh para pebisnis di Kota Surakarta, sehingga hipotesis diterima.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data dalam penelitian yang dilakukan di Kota Surakarta berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan keabsahan.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 50 pebisnis yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Sampel yang lain tidak digunakan karena tidak sah.

Tabel 2

Deskripsi data tentang keabsahan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sah	50	75,76%
2	Tidak sah	16	24,24%

Dari data di atas menunjukkan bahwa responden yang mengerti dan paham dalam pengisian kuesioner dengan benar sebanyak 75,76% dan sebanyak 24,24% melakukan pengisian kuesioner dengan cara yang salah, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 sampel.

2. Berdasarkan hukum.

Tabel 3

Deskripsi data berdasarkan hukum

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Berijin	41	82%
2	Tidak berijin	9	18%

Dari data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 82% pebisnis yang ada di Kota Surakarta sudah memiliki ijin usaha dan sebanyak 18% belum memiliki ijin usaha.

3. Berdasarkan jenis usaha

Tabel 4
Deskripsi data berdasarkan jenis usaha

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Perusahaan dagang	40	80%
2	Perusahaan jasa	10	20%

Dari data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 80% pebisnis di Kota Surakarta jenis usahanya adalah perusahaan dagang dan sebanyak 20% jenis usahanya adalah perusahaan jasa.

Tabel 5
Hasil kuesioner

Variabel	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju	Total jawaban kuesioner
Independen	376	387	44	0	807
Dependen	532	333	84	6	955
Total	908	720	128	6	1762

Berdasarkan analisa data dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil prosentase kuesioner berdasarkan Variabel Independen

Tabel 6
Hasil Prosentase Kuesioner Variabel Independen

Jawaban kuesioner	Jumlah	Prosentase (%)
Sangat setuju	376	46,59
Setuju	387	47,96
Tidak setuju	44	5,45
Sangat tidak setuju	0	0

Pada Tabel 6 dapat dilihat sebanyak 46,59% responden menjawab sangat setuju yang berarti bahwa laporan keuangan kurang diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta. Sebanyak 47,96% responden menjawab setuju yang berarti bahwa laporan keuangan kurang diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta. Sebanyak 5,45% responden menjawab tidak setuju yang berarti bahwa laporan keuangan tidak diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta. Tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju yang berarti bahwa laporan keuangan tidak ada yang tidak diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta.

2. Hasil prosentase kuesioner berdasarkan Variabel Dependen

Tabel 7
Hasil Prosentase Kuesioner Variabel Dependen

Jawaban kuesioner	Jumlah	Prosentase (%)
Sangat setuju	532	55,71
Setuju	333	34,87
Tidak setuju	84	8,80
Sangat tidak setuju	6	0,63

Pada Tabel 7 dapat dilihat sebanyak 55,71% responden menjawab sangat setuju yang berarti bahwa laporan keuangan sudah cukup banyak diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta. Sebanyak 34,87% responden menjawab setuju yang berarti bahwa laporan keuangan kurang diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta. Sebanyak 8,80% responden menjawab tidak setuju yang berarti bahwa laporan keuangan tidak diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta. Sebanyak 0,63% responden menjawab sangat tidak setuju yang berarti bahwa laporan keuangan tidak diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta.

3. Hasil prosentase kuesioner berdasarkan Variabel Dependen dan Variabel Independen

Tabel 8
Hasil Prosentase Kuesioner Variabel Dependen Dan Variabel Independen

Jawaban kuesioner	Jumlah	Prosentase (%)
Sangat setuju	908	51,53
Setuju	720	40,86
Tidak setuju	128	7,26
Sangat tidak setuju	6	0,34

Pada Tabel 8 dapat dilihat sebanyak 51,53% responden menjawab sangat setuju yang berarti bahwa laporan keuangan cukup banyak diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta. Sebanyak 40,86% responden menjawab setuju yang berarti bahwa laporan keuangan kurang diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta. Sebanyak 7,26% responden menjawab tidak setuju yang berarti bahwa laporan keuangan tidak diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta. Sebanyak 0,34% responden menjawab sangat tidak setuju yang berarti bahwa laporan keuangan tidak diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta.

Berdasarkan hasil dari prosentase kuesioner sebesar 51,53%, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban cukup banyak diterapkan oleh para pebisnis di Kota Surakarta, sehingga hipotesis ditolak.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar pebisnis di Kota Surakarta sudah mengenal laporan keuangan dan sudah menerapkan laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban. Meskipun dalam menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang tidak lengkap. Laporan keuangan mereka gunakan untuk mempermudah menghitung tingkat profitabilitas (keuntungan perusahaan)

dan tingkat resiko perusahaan. Sebagian besar laporan keuangan juga menyediakan informasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan bagi pebisnis di Kota Surakarta.

2. Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran antara lain:

- a. Diharapkan para pebisnis memahami laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan salah satu alat pertanggungjawaban.
- b. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar agar lebih mudah bagi pemakai untuk pengambilan keputusan.
- c. Dalam penyusunan laporan keuangan data diklasifikasikan untuk mempermudah dalam penyusunan, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
- d. Sebaiknya akuntabilitas laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban pebisnis lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. 1997. *Intermediate Accounting*. BPFE :Yogyakarta.
- Bodnar, GH. 1991. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Christensen, RA, dan Ebrahim, A. 2006. How does accountability affect mission? The case of a nonprofit serving immigrants and refugees. *Nonprofit Management and Leadership*, 17(2), 195.
- Cooper, DR dan Emory, CW. 1996. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ebrahim, A. 2003a. Accountability in practice: Mechanisms for NGOs. *World Development*, 31(5), 813–829.
- Ebrahim, A. 2003b. Making sense of accountability: Conceptual perspectives for Northern and Southern nonprofits. *Nonprofit Management and Leadership*, 14(2), 191.
- Ebrahim, A. 2005. Accountability myopia: Losing sight of organizational learning. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 34(1), 56.
- Ebrahim, A., & Weisband, E. (Eds.). 2007. *Global accountabilities: Participation, pluralism, public ethics*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Hakim, A. 1995. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hanks, C. 2014. Should the Federal Government Continue Its Pursuit of Proprietary Financial Statements? *The Journal of Government Financial Management* 63.1 (Spring): 12-18.
- Koppell, J. G. 2005. Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of multiple accountabilities disorder. *Public Administration Review*, 65(1), 94–108.
- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Shayne, Christopher, CFA. 2012. Financial Statement Analysis: A Practitioners Guide. *Financial Analysts Journal* 68.6: 106-107.
- Saraswati, D, Suhadak, dan Handayani, S.R. 2013. Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Koperasi. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 6 (2): 1-10.
- Soemarso. 2002. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat
- Soepriyanto, G, Jusuf, AA, dan Djakman, CD. 2009. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia Buku I*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2002. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabet
- Williams, AP, dan Taylor, JA. 2013. Resolving Accountability Ambiguity in Nonprofit Organizations. *Voluntas* 24:559–580.
- Viyanti dan Se Tin. 2010. Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Terhadap Penilaian Prestasi Kerja. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 1 (3).